

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangat diperlukan pada bab ini untuk memaparkan peninjauan peneliti atas salah satu penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan peneliti yang akan diteliti. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian pertama, penelitian Muhammad ja'far shodiq pada tahun 2019 yang berjudul "*Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan Di Kelurahan Depok, Kota Depok)*". Pada penelitian tersebut pendekatan yang digunakan ialah Metode kualitatif. Hal itu bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh yang dilakukan oleh tim KOTAKU di bawah naungan Dinas Perumahan dan Permukiman di Kelurahan Depok dalam perspektif fungsi administrasi yang terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, dan Directing* serta untuk mengetahui apakah dengan diimplementasikan program KOTAKU di Kelurahan Depok mampu mengurangi kawasan kumuh yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian terdiri

dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang yang digunakan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian yang ia teliti, pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Depok belum baik, hal tersebut didasari dengan dilaksanakannya program kota tanpa kumuh berdasarkan fungsi administrasi yang diajukan peneliti pada fokus penelitian. Namun sejalan dengan itu masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti contoh dalam proses *Organizing* dan *Staffing*. Adapun pelaksanaan program KOTAKU dalam mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Depok dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya hal itu dapat dibuktikan dengan berkurangnya besaran wilayah kumuh di Kelurahan Depok serta, terbangunnya pemenuhan akan perbaikan wilayah di Kelurahan Depok dalam menjawab beberapa indikator kekumuhan.

Penelitian kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Irma pada tahun 2019 dengan judul “*Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “Kotaku” Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara memilih informan sebanyak 5 orang yang ditetapkan secara purposive sampling. Pada Penelitian ini menunjukkan bahwa program Kota

Tanpa Kumuh akan berjalan dengan melakukan musyawarah kelurahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Program Tanpa Kumuh Kelurahan Parang Tambung sudah berjalan sesuai dengan tujuan KOTAKU.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmadani pada tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Raba)*”. Pada penelitian tersebut pendekatan yang digunakan ialah Metode Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, data primer berupa data utama yang diperoleh dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa arsip dan data-data lain. Hasil penelitian bahwa capaian luas kawasan kumuh Skala Kawasan Kota Baru yang terdapat di Kecamatan Raba terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Penaraga dengan luas kawasan kumuh 8,49 Ha dengan capaian pengurangan kumuh mencapai 1,2 Ha dan sisa luasan kumuh mencapai 7,29 Ha. Kelurahan Rontu dengan luas kawasan kumuh mencapai 3,17 Ha dengan capaian pengurangan kumuh mencapai 2,45 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 0,77 Ha. Kelurahan Rabadompu Barat dengan luas kawasan kumuh 1,78 Ha dan capaian pengurangan kumuh mencapai 0,7 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 1,08 Ha. Kelurahan Rabangodu Utara dengan luas kawasan kumuh mencapai 5,81 Ha dengan capaian pengurangan kumuh mencapai 1,8 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 4,01 Ha. Dengan demikian total pencapaian pengurangan kumuh skala kawasan Kota Baru mencapai 6,15 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 13,10 Ha.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian/ Tahun Penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	Muhammad Ja'far Shodiq /2019	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan Di Kelurahan Depok, Kota Depok)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh belum baik, ini didasari dengan dilakukannya fungsi administrasi yang diajukan, namun juga masih banyak yang perlu dikoreksi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Akan tetapi, dengan adanya program ini bisa dikatakan berhasil, karena terbentuknya dukungan pemerintah daerah akan perbaikan wilayah di Kelurahan Depok.
2	Irma/2019	Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “Kotaku” Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Program Tanpa Kumuh Kelurahan Parang Tambung sudah berjalan sesuai dengan tujuan KOTAKU. Dimana program ini meliputi bidang Sosial dan Ekonomi, Pembangunan lingkungan dan fasilitas untuk memperbaiki jalan, persampahan, penerangan jalan.
3	Putri Rahmadani /2021	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bima (Studi	Hasil penelitian ini bahwa capaian luas kawasan kumuh Skala Kawasan Kota Baru yang terdapat di Kecamatan Raba terdiri dari empat kelurahan. Namun dari ke-empat kelurahan itu total pencapaian pengurangan kumuh skala kawasan Kota Baru

		Kasus Kecamatan Raba)	mencapai 6,15 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 13,10 Ha. Maka Program Kota Tanpa Kumuh dapat dikatakan berhasil.
--	--	-----------------------	---

Sumber: Diolah Peneliti,2022

2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Strategi

Strategi merupakan arahan untuk mencapai tujuan, dalam berkembangnya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture.

Strategi merupakan sebuah potensial dan membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan potensial atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di capai.²⁸

²⁸ <http://library.binus.ac.id> diakses pada tanggal 1 agustus 2022

Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

A. Tahap Tahap Strategi

Tahap strategi merupakan penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang dibuat untuk menemukan langkah yang tepat dari masalah tersebut. Dalam hal ini agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan, strategi yang dibuat bisa di implementasikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Menurut Haryadi (2005) berpendapat bahwa ada dua tahap strategi, kedua tahap strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan

Dijelaskan tahap pertama dari bagian yang meliputi analisis lingkungan internal maupun eksternal adalah penetapan perencanaan dan tujuan strategi. Perumusan strategi bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah yang akan datang agar

bisa membangun visi dan misinya dari perumusan tersebut dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut agar tercapainya penyediaan customer value terbaik.

2. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi dapat terselesaikan maka selanjutnya tahap krusial dalam strategi pemerintah adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur, pembangunan program, budget dan pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan tidak sesuai dengan perkiraan semula. Keberhasilan dalam strategi tentunya harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, kebijaksanaan yang tepat, alokasi sumber daya yang cukup, situasi, budaya dan kondisi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan strategi.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahap strategi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan yang tepat dengan merumuskan visi dan misi dari kebijakan tersebut, kemudian setelah dirumuskan dibutuhkan pelaksanaan yang tepat pula agar strategi dari kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.²⁹

²⁹ Hariadi, Bambang. 2005. Strategi Manajemen. Malang: Bayumedia Publishing

B. Jenis-Jenis Strategi

Ada beberapa instansi atau organisasi yang menjalankan suatu strategi atau lebih secara bersamaan, namun hal tersebut dapat sangat beresiko dan mengancam jika dijalankan terlalu jauh diperusahaan yang besar dan terdiverifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Adapula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Adapun jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

1. Strategi integrasi, strategi integrasi terbagi 2 macam yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Suatu strategi integrasi vertikal atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan yang dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan/atau pesaing.
2. Strategi intensif, penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
3. Strategi diversifikasi, adapun strategi diversifikasi yang harus dipahami, yaitu diverifikasi horizontal, konglomerat

dan konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

4. Strategi Defensif, Ada tiga strategi defensif yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.³⁰

2.2.2. Strategi Menurut Henry Mintzberg

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori menurut Henry Mintzberg, ada beberapa indikator penerapan strategi yaitu:

1. Strategi as a *Plan* (Rencana dan Tujuan)

Merupakan suatu keputusan yang direncanakan secara terbuka dalam wujud perencanaan (*planning*) akan memperjelas itikad sertatujuan yang akan dicapai organisasi.

2. Strategi as a *Ploy* (Rancangan Tindakan)

Merupakan suatu keputusan yang dicoba untuk mengecoh organisasi lain ataupun pihak kompetitor. Rancangan tindakan beratertutup atau tersamar sehingga pihak lain tidak menatap jelas sebab yang dimaksudkan agar tujuan organisasi bisa

³⁰ Hatten, Kenneth J, dan Hatten, Marry Louise. 1998. Efektive Strategi Management. Englewood cliffs: Precentice Hall

tercapai. Strategi ini berakar dari gaya militer yang memiliki ciri semacam siasat buat memecah musuh.

3. Strategi as a *Pattern* (Tindakan yang Menggunakan Pola)

Merupakan suatu keputusan yang dicoba terus-menerus ataupun berulang sehingga membentuk pola aktivitas atau aksi sikap dalam organisasi ataupun metode dalam mengalami area luar. Berarti inilah strategi yang menggunakan pola yang dibangun organisasi dalam usaha untuk menggapai suatu tujuan.

4. Strategi as a *Position* (Adaptasi terhadap Lingkungan)

Merupakan suatu keputusan yang dicoba membuat mencocokkan organisasi dengan lingkungannya, semacam merancang struktur organisasi yang terdeferensiasi guna menangani kawasan yang berubah-ubah serta tidak terduga ataupun usaha untuk mengamankan keunggulan kompetitif organisasi karena mempunyai posisi yang unik serta solid dipublik.

5. Strategi as a *Perspective* (Cara Pandang)

Merupakan suatu keputusan untuk mewakili kiat industri memandang diri sendiri. Bukan hanya sebatas posisi yang akan diseleksi, namun tentang pemikiran yang besar kedepannya. Elemen tersebut merupakan tentang gimana industri organisasi untuk membangun budaya serta nilai-nilai yang selaras dengan tujuan industri atau organisasi.³¹

³¹ Henry Mintzberg (1991) dalam, Didit Setiabudi, Essay "Tentang Strategi", 20

Berdasarkan pembahasan diatas, maka terdapat 5 indikator strategi yaitu: *Plan, Ploy, Pattern, Position* dan *Perspective* yang untuk menjawab sebuah rumusan pada Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji).

Peneliti menggunakan teori Henry Mintzberg karena teori ini memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap berbagai fenomena strategi dalam dunia program , kebijakan dan tujuan organisasi dan bukan melihat strategi sebagai salah satu dari rencana saja.

2.2.3. Program Kotaku

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.³²

Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan

³² <http://kotaku.pu.go.id> diakses pada tanggal 12 maret 2022

pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap:

- a) Pendataan;
- b) Perencanaan;
- c) Pelaksanaan,
- d) Pemantauan Dan Evaluasi, dan
- e) Keberlanjutan.

Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB).³³

³³ <http://kotaku.pu.go.id> diakses pada tanggal 19 mei 2022

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Tujuan lain Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood).³⁴

Untuk mengembangkan tujuan diatas, melakukan melalui kegiatan:

- A. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- B. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah , serta
- C. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

³⁴ Direktorat pengembangan Kawasan pemukiman kumuh. diakses pada tanggal 25 maret 2022

Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut;

1. Kondisi Bangunan Gedung
 - A. Ketidakteraturan bangunan;
 - B. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - C. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi Jalan Lingkungan
 - A. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - B. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
 - A. Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - B. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. Kondisi Drainase Lingkungan
 - A. Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - B. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - C. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - A. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- B. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknik.
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
- A. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- B. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
- A. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.³⁵

2.2.4. Pemerintah dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

³⁵ Permen PUPR No. 14 tahun 2018. diakses pada tanggal 24 July 2022

Pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan diri dan menampakkan jati dirinya. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Pemukiman yaitu dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Pemukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam pemukiman. Pemukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat.³⁷

³⁶ Ridho, Muhammad Agung. 2001. *Kemiskinan dan pemukiman di Perkotaan*. Semarang: Unissula.

³⁷ Budiharjo Mangunwijaya, "Sejumlah Masalah Permukiman Kota", (Bandung : Alumni, 1992), halaman 11

Permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

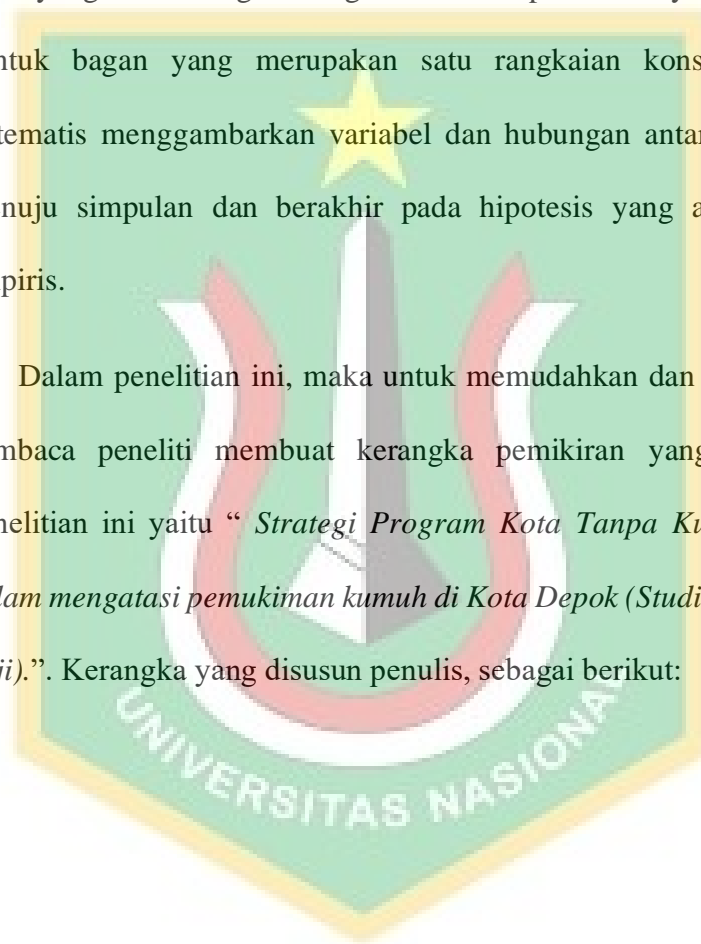
Untuk itu, penyelenggaraan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan swadaya masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu

melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu.³⁸

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel hingga menuju simpulan dan berakhir pada hipotesis yang akan diuji secara empiris.

Dalam penelitian ini, maka untuk memudahkan dan pemahaman bagi pembaca peneliti membuat kerangka pemikiran yang berfokus pada penelitian ini yaitu “ *Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kota Depok (Studi pada Kecamatan Beji).*”. Kerangka yang disusun penulis, sebagai berikut:



³⁸ Undang Undang Tata Ruang Indonesia No 1 tahun 2011

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

